

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hadirnya kebijakan tentang Badan Usaha Milik Desa atau yang disingkat menjadi BUMDes merupakan sebuah kebijakan yang memberikan sebuah angin segar bagi masyarakat. BUMDes hadir untuk memberikan kesempatan bagi masyarakat agar dapat meningkatkan kesejahteraannya. Sebagaimana BUMDes menurut Permendagri No. 39 Tahun 2010 tentang BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh Pemerintah Desa yang kepemilikan modalnya dan pengelolaannya diatur oleh Pemerintah Desa dan masyarakat sekitar. Badan Usaha Milik Desa adalah lembaga usaha yang dikelola langsung oleh masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.¹

Berdasarkan Undang-Undang tersebut Badan Usaha Milik Desa memiliki tujuan yang tercantum dalam Pasal 3 Permandes No. 4 tahun 2015 yaitu: (1) Meningkatkan perekonomian desa, (2) Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan desa, (3) Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa, (4) Mengembangkan rencana kerjasama usaha antar desa dan atau dengan pihak ketiga, (5) Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, (6) Membuka lapangan kerja, (7) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan

¹Satriawan H, Mawardi Saleh. 2019. Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Sesela Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Transformasi* . Vol 5 No 1

pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa, dan (8) Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan Pendapatan Asli desa.

Kemandirian desa merupakan salah satu fokus pemerintah pusat dalam orientasi pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah mengeluarkan undang-undang² sebagai wujud terhadap upaya penguatan kemandirian desa. Tidak dapat dipungkiri dengan luas wilayah Indonesia, sebagian besar penduduknya bertempat tinggal di pedesaan dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, BUMDes hadir untuk dapat meningkatkan pemanfaatan tersebut. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) lahir sebagai wujud untuk pemberdayaan masyarakat dan pemerhati masalah yang ada di desa.

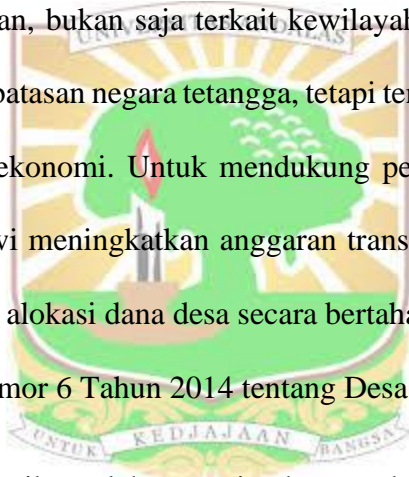
Permasalahan yang ada seperti kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi serta pendidikan masih mewarnai kehidupan berbagai dan bernegara padahal Indonesia memiliki kekayaan dengan sumber daya alam yang berlimpah. Indonesia juga memiliki wilayah yang sangat luas dan desa merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang harus disejahterakan. Kehadiran negara seharusnya menciptakan kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat, namun tampaknya masih belum terwujud. Berbagai cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan fungsi dan tugas negara bagi rakyat, dengan adanya keputusan ini yang dituangkan dalam peraturan Desa No. 06 Tahun 2014 untuk dapat memanfaatkan sumber daya yang ada di desa.

Pencalonan Presiden Indonesia yang dilakukan oleh Jokowi tahun 2014, tentang pembangunan perbatasan menjadi salah satu poin Nawacita³. Presiden Jokowi menebalkan

²Pada awalnya diamanatkan Dalam Bab VII, Bagian Ke-V pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan berdasarkan PP 72 Tahun 2005 Tentang Desa lalu berubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

³Nawacita Joko Widodo-Jusuf Kalla adalah sembilan agenda prioritas jika terpilih sebagai presiden dan wakil presiden,yaitu: (1) Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada

prase membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Pembangunan tidak lagi terpusat di perkotaan (sentralisasi), melainkan harus dilakukan penyebaran di seluruh pelosok Indonesia (desentralisasi⁴). Membangun daerah pinggiran, bukan saja terkait kewilayahan atau geografis daerah-daerah yang berdekatan dengan perbatasan negara tetangga, tetapi tentang manusia yang terpinggirkan dan kurang mampu secara ekonomi. Untuk mendukung peningkatan pembangunan fisik di daerah, Pemerintahan Jokowi meningkatkan anggaran transfer ke daerah dan dana desa dari tahun ke tahun. Peningkatan alokasi dana desa secara bertahap ini, sekaligus untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.⁵



Dana desa yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa bertujuan agar pemerintah desa dapat mengelola potensi yang ada di desa dan salah satunya melalui Badan Usaha Milik Desa. Dilatar belakangi pada tahun 2019 dilakukan penilaian Badan Usaha

seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara tri matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. (2) Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan. (3) Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. (4) Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. (5) Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program “Indonesia Pintar” serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program “Indonesia Kerja” Dan “Indonesia Sejahtera” dengan mendorong land reform and program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019. (6) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya. (7) Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. (8) Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia. (9) Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga. Diakses lebih lanjut di https://www.kpu.go.id/koleksigambar/visi_misi_jokowidodo-jk.pdf pada pukul 16:15 tanggal 26 Februari 2020

⁴Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonom, Diakses Di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Bab 1 Pasal 1 Ayat 8.

⁵Membangun Indonesia Dari Pinggiran Desa di akses di <https://setkab.co.id/membangun-indonesia-dari-pinggiran-desa/> pada tanggal 26 Februari 2020 pukul 15.53.

Milik Desa se-Indonesia yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, bahkan BUMDes ini juga dapat menghasilkan pendapatan yang berlimpah bagi masyarakat dan hasil dari penilaian tersebut terdapat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Daftar lima Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terbaik di Indonesia
Tahun 2019

No	Nama BumDes	Lokasi BumDes	Keterangan
1.	BUMDes Tirta Mandiri	Dusun Umbul, Desa Ponggok, Klaten, Jawa Tengah	Bumdes Tirta Mandiri bergerak dalam bidang kepariwisataan, menariknya BUMDes ini pernah dinobatkan sebagai BUMDes terbaik di Indonesia. Omset BUMDes ini adalah 10.36 Miliar dengan laba bersih mencapai 6.5 miliar
2.	Badan Usaha Milik Desa Multianggaluku Mandiri	Desa Kalukubula, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah	BUMDes Multianggaluku sudah mampu meningkatkan taraf hidup masyarakatnya dengan membuka toko penyaluran barang-barang bersubsidi dari pemerintah, terbukti mampu membantu masyarakat setempat untuk menikmati secara merata.
3.	Badan Usaha Milik Desa Cibodas	Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat	Bergerak dibidang penyaluran air bersih dan memiliki 3.200 konsumen bukan hanya dengan mencari keuntungan secara finansial saja namun harus memberikan manfaat yang dirasakan masyarakat setempat
4.	Badan Usaha Milik Desa Tirtonirmolo	Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta	Bergerak dalam bidang simpan pinjam dan menghasilkan keuntungan mencapai Rp. 8.7 miliar. Kegiatan ini sangat membantu perekonomian masyarakat di desa tersebut karena bunga yang diberikan lebih kecil dari bank.
5.	Badan Usaha Milik Desa Karya Jaya Abadi	Desa Amin Jaya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat,	BUMDes Karya Jaya Abadi berhasil mengukuhkan diri sebagai BUMDes paling kreatif tingkat nasional. BUMDes ini dinilai aktif, inovatif, serta memiliki langkah yang cukup berani dalam memajukan perekonomian masyarakat setempat. Bergerak

Sumber : *Data sekunder* diolah oleh peneliti dari berdesa.com tahun 2020

Pada tabel 1.1 terdapat lima Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terbaik di Indonesia pada tahun 2019 yaitu : (a) BUMDes Tirta Mandiri dengan peringkat pertama, (b) Badan Usaha Milik Desa Multianggaluku Mandiri dengan peringkat kedua, (c) Badan Usaha Milik Desa Cibodas dengan peringkat ketiga, (d) Badan Usaha Milik Desa Tirtonirmolo dengan peringkat keempat dan (e) Badan Usaha Milik Desa Karya Jaya Abadi di peringkat kelima. Dari tabel 1.1 terlihat bahwa BUMDes Tirta Mandiri, merupakan peringkat pertama dalam mengelola pariwisata dan menghasilkan omset yang berlimpah.

BUMDes Tirta Mandiri awalnya bergerak pada peminjaman modal dan kegiatan pariwisata umbul ponggok sebagai wahana rekreasi. Modal awal untuk mendirikan BUMDes ini dengan menggunakan dana APBDes. Berdirinya BUMDes Tirta Mandiri ini pada dasarnya membangun tradisi berdemokrasi di desa serta memperbaiki perekonomian dan kehidupan masyarakat desa. Adanya daftar inventaris potensi dan peta aset desa, forum musyawarah Desa Ponggok melakukan praktik *deliberative democracy*⁶ untuk menyepakati gagasan pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset desa melalui BUMDes.

Keputusan ini dituangkan dalam Keputusan Kepala Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten Nomor : 141/11/XII/2009 Tentang Penyerahan Aset-Aset Usaha Desa Ke BUMDes Tirta Mandiri. penyerahan aset-aset desa sebagai bukti bahwa Badan Usaha

⁶*Deliberative Democracy* merupakan suatu bentuk demokrasi dimana musyawarah merupakan pusat pengambilan keputusan. elemen-elemen yang terlibat dari kedua pengambilan keputusan konsensus dan aturan mayoritas. *deliberative democracy* yang paling hegemonik adalah demokrasi liberal. kehadirannya merupakan bagian dari sosial antagonisme. dengan identitas ini, dapat mempertegas perbedaan dan berlawanan dengan menampilkan elemen partisipatoris. partisipatoris mempunyai kaitan erat dengan kesadaran kelas sebagai sebuah masyarakat dan politik redistribusi kemakmuran. Lebih Lanjut Rujuk Dias Prasongko. 2016. Mengambil Jalan Lain: Praktik Diskursif Dan Hadirnya Demokrasi Partisipatoris (Potret Diskursus Demokrasi Dalam Media Indoprogres Sebuah Pendekatan Analisis Diskursif). *Skripsi*. Universitas Gadjah Mada.

Milik Desa (Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan sehingga badan hukum Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) disebut juga dengan perusahaan desa. Kehadiran BUMDes Tirta Mandiri memberikan efek positif kepada desa dan masyarakat desa, hal ini dapat dilihat pada table 1.2 berikut :

Tabel 1.2
Pendapatan Kotor BUMDes Tirta Mandiri

No.	Tahun	Pendapatan Kotor
1	2012	Rp. 150 juta
2	2013	Rp. 600 juta
3	2014	Rp. 1,1 miliar
4	2015	Rp. 6,1 miliar
5	2016	Rp. 10,3 miliar
6	2017	Rp. 12 miliar

Sumber: Data *Sekunder* yang diolah oleh peneliti di BUMDes Tirta Mandiri di swa.co.id tahun 2020

Pada tabel 1.2 terdapat pendapatan kotor yang dihasilkan oleh BUMDes Tirta Mandiri memang menunjukkan perkembangan fantastis. Bukan hanya dari segi pendapatannya, direktur BUMDes Tirta Mandiri juga berhasil mengembangkan 13 unit usaha, sembilan diantaranya sudah berbentuk PT. Berkat prestasi yang diraihinya, tahun 2016 BUMDes Tirta Mandiri berhasil menjadi BUMDes yang menginspirasi pengembangan Bumdes se-Indonesia serta tahun 2017 BUMDes Tirta Mandiri meraih penghargaan sebagai pemenang

kategori Desa Wisata Pemberdaya Masyarakat yang diberikan Kementerian Desa PDIT dalam ajang Expo BUMDes Nusantara 2017 di Bukittinggi, Sumatera Barat.⁷

Gambar 1.1

Piagam Penghargaan BUMDes Menginspirasi se-Indonesia



Sumber : *Data sekunder* diolah oleh peneliti di kantor Desa Ponggok tahun 2020

BUMDes Tirta Mandiri bukan hanya memiliki usaha, namun BUMDes Tirta Mandiri juga memiliki program-program untuk masyarakat Desa Ponggok yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) secara maksimal. Walaupun BUMDes Tirta Mandiri pada saat ini sudah dapat dikatakan sukses dalam memanfaatkan sumber daya yang telah ada, namun periode awal BUMDes Tirta Mandiri tidak memiliki perjalanan yang mudah. Padahal sudah menjadi keputusan bersama dalam pembentukan tetapi masih ada kelompok masyarakat yang memandang sebelah mata. Melalui sosok kepala desa yang merupakan pemimpin yang

⁷Bumdes Tirta Mandiri Menembus Batas, Diakses Di <https://Swa.Co.Id/Swa/Trends/Bumdes-Tirta-Mandiri-Menembus-Batas> Pada Tanggal 8 Februari 2020 Pukul 17.32 Wib

visioner beliau menyampaikan gagasan prinsip *Believing is Seeing*⁸, sampailah pada satu tahun periode BUMDes Tirta Mandiri dengan laba Rp. 100.000.000,- dan disetor sebagai PAD sebesar Rp. 30.000.000,- pada tahun 2010, hingga pada tahun 2019 BUMDes dapat menyeter PAD Rp. 1.000.000.000,- dapat dilihat pada gambar 1.2 berikut:



Gambar 1.2

APBDES Desa Ponggok Tahun 2019

⁸Kepala Desa Ponggok yang dijabat oleh Bapak Junaedi Mulyono, Sh merupakan sosok yang visioner, melihat masa depan. Beliau Menyampaikan gagasan prinsip *believing is seeing* (kalau kita percaya pasti kita akan melihat) itu yang menjadi kekuatan agar beliau tidak menyerah dalam mewujudkan cita-cita, karena menyadari bahwa untuk meyakinkan masyarakat tidaklah mudah, karena masyarakat berpikiran *seeing is believing* (kalau melihat baru percaya) maka perlu bukti untuk menumbuhkan kepercayaan dari masyarakat. Dapat dirujuk di Bumdesa Tirta Mandiri Menggerakkan Sektor Perekonomian Desa Ponggok, Diakses Ponggok.Desapintar.Co.Id/Potensi/Detail/29-06-2018-Bumdesa-Tirta-Mandiri-Menggerakkan-Sektor-Perekonomian-Desa-Ponggok pada tanggal 7 Februari 2020 pukul 00.02 WIB.



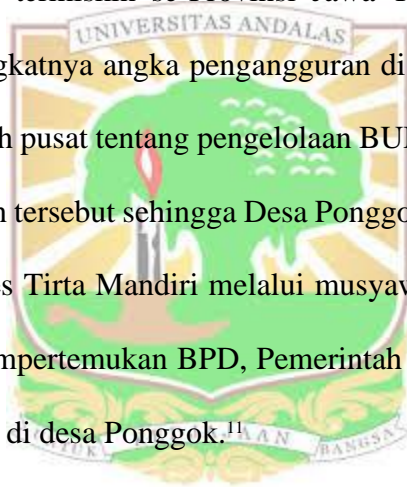
Sumber : *Data sekunder* diolah oleh peneliti di kantor Desa Ponggok tahun 2020

Pencapaian yang dilakukan oleh BUMDes Tirta Mandiri memberikan dampak positif kepada masyarakat di Desa Ponggok. Padahal, sebelum adanya BUMDes Tirta Mandiri ini, Desa Ponggok dapat dikatakan sangat memprihatinkan. Kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat di Desa Ponggok sudah berada di bawah garis kemiskinan. Akibatnya, Desa Ponggok yang berada di wilayah Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah menjadi salah satu desa tertinggal dan masuk dalam program Inpres Desa Tertinggal (IDT).⁹

⁹Bumdes Tirta Mandiri Menembus Batas, diakses di <https://Swa.Co.Id/Swa/Trends/Bumdes-Tirta-Mandiri-Menembus-Batas> pada tanggal 28 Februari 2020 pukul 00.24 WIB.

Namun, Junaedi sebagai kepala desa membuat RPJM Desa pada tahun 2007 dan BUMDes merupakan salah satu cara memperbaiki ekonomi desa.

Desa Ponggok di Kabupaten Klaten merupakan salah satu desa yang berasal dari kawasan Desa Mataram Kuno yang di dalamnya menyimpan air yang melimpah, hal ini juga dapat dilihat hadirnya PT Aqua yang memanfaatkan sumber air di Desa Ponggok yang menjadi pemasukan di Desa Ponggok yang dapat dilihat pada gambar 1.2 di atas. Desa Ponggok dulunya masuk daftar desa termiskin se-Provinsi Jawa Tengah, karena rendahnya angka pendidikan sehingga meningkatnya angka pengangguran di Desa Ponggok tersebut.¹⁰ Ketika diamanatkan oleh pemerintah pusat tentang pengelolaan BUMDes, Pemerintah Daerah Klaten juga mengeluarkan peraturan tersebut sehingga Desa Ponggok mendirikan Badan Usaha Milik Desa dengan nama BUMDes Tirta Mandiri melalui musyawarah desa sebagai bentuk wujud demokrasi lokal dengan mempertemukan BPD, Pemerintah Desa dan kelompok warga resmi dalam mendirikan BUMDes di desa Ponggok.¹¹



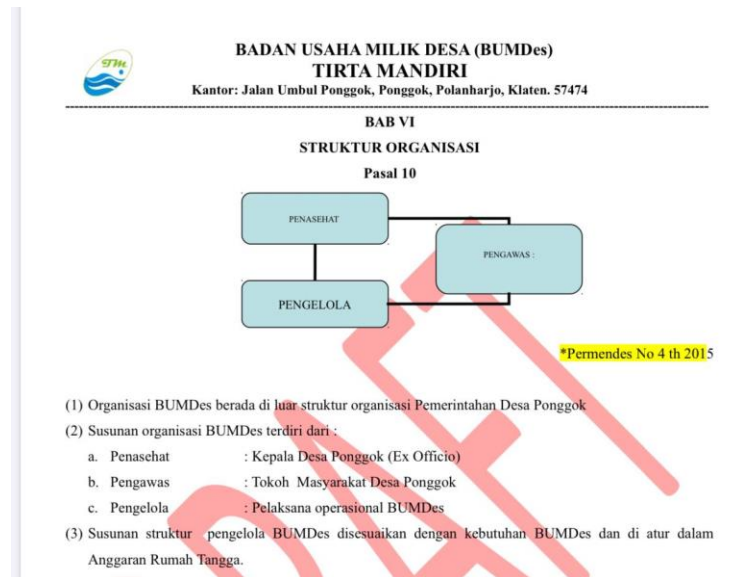
Pendirian dan pembentukan BUMDes Tirta Mandiri berdasarkan hukum Perdes No.6 tahun 2009 yang menjadi landasan pembentukan. Artinya, dalam mendirikan BUMDes Tirta Mandiri pemerintah harus bersinergi dengan aktor-aktor lainnya. Tentunya hal ini berpengaruh positif terhadap BUMDes Tirta Mandiri, karena masyarakat juga ikut terlibat dalam pembentukan dan menjalankan BUMDes Tirta Mandiri. Pada tanggal 15 Desember 2009 BUMDes Tirta Mandiri resmi didirikan di Desa Ponggok dengan landasan Peraturan

¹⁰Desa Ponggok, Dulu Miskin Kini Hasilkan Pendapatan Miliaran Per Tahun, diakses Di <https://www.google.co.id/amps/s/m.kumparan.com/amp/kumparantravel/desa-pongok-dulu-miskin-kini-habiskan-apbd-rp3-9-miliar> pada tanggal 2 Maret 2020 pukul 18.56 WIB.

¹¹Bumdes Tirta Mandiri Menggerakkan Sektor Perekonomian Desa Ponggok, diakses di <https://www.potensi.com/Detail/29-06-2018-Bumdesa-Tirta-Mandiri-Menggerakkan-Sektor-Perekonomian-Desa-Ponggok> pada tanggal 7 Februari 2020 pukul 18.59 WIB.

Pemerintah Kabupaten Klaten Nomor 20 Tahun 2006 tentang Badan Usaha Milik Desa. Untuk menjalankan BUMDes Tirta Mandiri dengan struktur organisasi pada bagan 1.1 sebagai berikut :

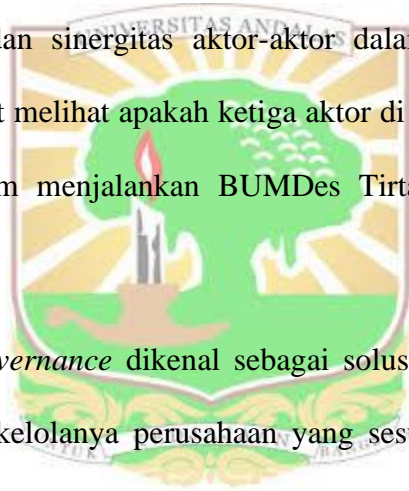
Bagan 1.1 Struktur Organisasi



Sumber : *Data sekunder* diolah oleh peneliti di AD/ART BUMDes Tirta MAndiri tahun 2020

Pada bagan 1.1 struktur organisasi BUMDes Tirta Mandiri terdiri dari Penasehat yang dijabat oleh Kepala Desa Pongok, lalu ada penasehat yang dijabat oleh kepala desa dan badan pengawas serta struktur pengurus BUMDes Tirta Mandiri. Dari struktur organisasi tersebut pengurus BUMDes Tirta Mandiri tidak hanya bersinergi dengan pemerintah desa, tetapi juga dengan aktor-aktor yang ada di dalam pemerintah desa tersebut. Walaupun dalam mencapai tata perusahaan yang baik terdapat tiga aktor yang harus memiliki hubungan yang bersinergi dalam menjalankan BUMDes Tirta Mandiri bisa saja terjadi bahwa BUMDes Tirta Mandiri dijalankan dengan terlibatnya aktor-aktor diluar dari ketiga aktor yang disebut dalam konsep *good corporate governance*.

Peneliti berasumsi bahwa dalam mencapai tata perusahaan yang baik (*good corporate governance*) ketiga aktor harus memiliki hubungan yang ideal dalam menciptakan kesepakatan bersama yang berhubungan dalam membangun BUMDes Tirta Mandiri. Keberhasilan BUMDes Tirta Mandiri ini tidak terlepas dari peran aktor pemerintah sebagai pembuat kebijakan berdirinya BUMDes Tirta Mandiri, dunia usaha yang memiliki peran dalam mengelola BUMDes Tirta Mandiri serta aktor masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa serta keterlibatan perwakilan masyarakat yang disebut juga sebagai BPD sebagai penyelenggara musyawarah desa. Maka peneliti memutuskan melakukan penelitian peran aktor dalam membentuk dan sinergitas aktor-aktor dalam menjalankan BUMDes Tirta Mandiri, sehingga kita dapat melihat apakah ketiga aktor di Desa Ponggok tersebut memiliki hubungan yang ideal dalam menjalankan BUMDes Tirta Mandiri dari *perspektif good corporate governance*.



Good corporate governance dikenal sebagai solusi krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia karena tidak terkelolanya perusahaan yang sesuai dengan regulasi dan banyak terjadinya praktek KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Hal ini dapat dilihat dari penelitian Iwan Nuryan dalam jurnal *Jurnal AdBispreneur* yang berjudul Strategi pengembangan dan penerapan *good corporate governance* (GCG) bagi BUMN dan BUMD di Indonesia¹². Ia mengatakan bahwa dalam mengatasi berbagai kendala di BUMN dan BUMD maka penerapan GCG karena dapat mereformasi sistem pemerintahan hingga terciptanya praktek yang bebas KKN serta reformasi di seluruh korporasi bisnis yang berjalan di Indonesia.

¹²Iwan Nuryan. 2016 Strategi pengembangan dan penerapan *good corporate governance* (GCG) bagi BUMN dan BUMD di Indonesia. *Jurnal AdBispreneur*. 2 (1) 141-151

BUMDes hadir sebagai perusahaan desa yang memiliki landasan hukum yang diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Daerah. Menurut Harjanti Widiastuti,dkk dalam *Jurnal Ekonomi Bisnis* yang berjudul Menakar tata kelola Badan Usaha Milik Desa di Indonesia, ia mengatakan bahwa sebagian besar BUMDes memiliki AD/ART yang jelas tetapi dalam penyusunan dokumen akuntabilitas keuangan belum dilaksanakan. Penerapan *good corporate governance* relatif rendah pada aspek *sustainability* dan akuntabilitas. Selain faktor BUMDes yang masih relatif muda perlu diperhatikan adanya keterlibatan aktor dalam kondisi dan keadaan desa tersebut dalam pembentukan dan menentukan landasan BUMDes apakah benar-benar diperlukan oleh masyarakat desa, namun kenyataannya bisa jadi BUMDes dapat menjadi berhasil atau gagal.

Hal ini dikarenakan banyaknya kepentingan-kepentingan aktor di dalam suatu kebijakan yang sesuai dengan penelitian Syahrani Firdaus yang berjudul “Fenomena *Elite Capture* dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) : Studi kasus strategi bekerjanya kekuasaan elite dalam pengelolaan BUMDes Argosari, Desa Pulosari, Kabupaten Pemalang”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana kekuasaan elit dalam mengelola BUMDes Argosari, Desa Pulosari, Kabupaten Pemalang. Penelitian terdahulu cenderung membahas bagaimana *good corporate governance* sebagai jawaban atas krisis ekonomi khususnya strategi dalam penerapan di BUMN dan BUMD dan bagaimana tata kelola dan bagaimana bekerjanya kekuasaan elit dalam mengelola BUMDes Argosari, Desa Pulosari, Kabupaten Pemalang, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan membahas peran aktor *good corporate governance* dalam keberhasilan BUMDes Tirta Mandiri.

Rumusan Masalah

Seperti yang telah diketahui bahwa konsep *good corporate governance* memiliki tiga aktor yang harus dapat bekerjasama dengan baik, baik dalam merumuskan, membentuk dan menjalankan suatu kebijakan maupun menyelesaikan permasalahan yang ada di perusahaan. Hal ini juga terjadi dalam merumuskan dan menjalankan BUMDes Tirta Mandiri, apalagi BUMDes Tirta Mandiri dapat dikatakan BUMDes yang sukses dan menjadi yang terbaik di Indonesia, baik dari segi penghasilan, maupun memanfaatkan sumber daya yang ada di desa.

Latar belakang yang dijelaskan sebelumnya menarik peneliti untuk menelisik beberapa data yang kemudian membantu penelitian untuk merumuskan permasalahan, diantaranya beberapa berita seperti dilansir dari (Balipost.com) Pengelolaan BUMDes Ponggok dengan Pesona Air Umbul Ponggok ini, mampu menggerakkan ekonomi desa. Bahkan, mampu memberdayakan warga sekitar dengan membuka aspek lapangan pekerjaan.

*“Pengelolaan BUMDes Ponggok dengan Pesona Air Umbul Ponggok ini, mampu menggerakkan ekonomi desa. Bahkan, mampu memberdayakan warga sekitar dengan membuka aspek lapangan pekerjaan.”*¹³

Sugeng Rajarjo selaku Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Ponggok mengatakan bahwa kesuksesan BUMDes Tirta Mandiri tidak lepasnya dari peranan Kepala Desa, pengelola dan tokoh masyarakat. Dibuktikan dengan pemberitaan balitribune.co.id yang mengatakan bahwa:

*“Kami bangga terkait kerja keras pimpinan (Kepala Desa Ponggok), pengelola dan tokoh masyarakat. Tahun 2017 pendapatan BUMDes kami tercatat Rp. 14,2 Miliar. Untuk setoran ke kas desa lebih Rp. 1.2 Miliar”*¹⁴

Sugeng Rajarjo juga mengatakan bahwa BUMDes Tirta Mandiri memiliki kerja sama dengan pihak swasta yaitu BNI dan BNI memberikan pelatihan untuk memberikan pelayanan perbankan. Ini dibuktikan dengan pemberitaan balitribune.co.id yang mengatakan bahwa:

¹³Dikutip dari Balipost.Com, Mandiri kelola potensi BUMDes Ponggok mampu hasilkan Rp 16 miliar setahun. Diakses pada tanggal 7 Februari 2020 pukul 14.52 WIB di (Www.Balipost.Com/News/2019/11/29/93591/Mandiri-Kelola-Potensi,Bumdes-Ponggok...Html)

¹⁴Dikutip dari Bali Tribune.Co.Id, Menengok Bumdes Ponggok Tirta Mandiri, Bumdes Terbaik Tingkat Nasional, Sukses Jadi “Mesin Uang” Desa, Bermodal Rp. 100juta Kini Pendapatan Lebih Dari Rp. 14,2 Miliar. Diakses pada tanggal 7 Februari 2020 pukul 21.45 di (<https://Balitribune.Co.Id/Content/Menengok-Bumdes-Ponggok-Tirta-Mandiri-Bumdes-Terbaik-Tingkat-Nasional-Sukses-Jadi-Mesin-Uang>)

“Bahwa BUMDes Tirta Mandiri merupakan nasabah bank BNI yang mendapatkan pelatihan pengembangan usaha. Melalui bank BNI, BUMDes Tirta Mandiri memiliki kemampuan pelayanan perbankan berskala terbatas, sehingga mampu meningkatkan program peningkatan literasi keuangan yang digagas oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ”¹⁵

Bukan hanya dari data tersebut yang membuat peneliti berasumsi melalui semangat membangun desa yang terwadahi oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 namun juga dengan fenomena dana desa yang diberikan oleh pemerintah kepada desa, kesuksesan BUMDes Tirta Mandiri ini tidak lepasnya dari peranan masyarakat serta pemerintah dan swasta. Dua pihak yang diharapkan berperan aktif selain masyarakat dalam mengembangkan BUMDes, yakni pemerintah daerah dan swasta. Pemerintah Daerah diharapkan dapat membantu dalam bentuk regulasi, program maupun bantuan teknis dan permodalan. Sedangkan, pihak swasta diharapkan melakukan kemitraan pendampingan maupun permodalan yang terkait langsung dengan kegiatan maupun programnya.

Ketika perumusan kebijakan untuk mendirikan BUMDes Tirta Mandiri ini seharusnya melibatkan ketiga aktor dalam perspektif *governance* yaitu Pemerintah Desa sebagai *state*, masyarakat desa sebagai *society* dan pihak swasta sebagai *private*, ketika ketiga aktor tersebut berhasil bekerjasama dengan baik maka indikator kesuksesan dalam perspektif *governance* berhasil dituju. Seiring meningkatnya angka partisipasi masyarakat dan dianggap lebih partisipatif namun menurut Furniss (1974), konsekuensi dari adanya arus desentralisasi akan selalu melibatkan banyak proses dan institusi baru yang dihadirkan sebagai wujud penyegaran struktur institusi lama. Arus desentralisasi sebagai upaya mencapai kemandirian tidak serta merta menggusur elite-elite predatoris desa yang sudah terlanjur menjadi elit penentu kebijakan. Kehadiran lembaga baru seperti BUMDes di desa seperti menyediakan arena besar

¹⁵ *Ibid*

bagi aktor politik baru maupun lama untuk kemudian berkontestasi menancapkan pengaruhnya.¹⁶

Badan Usaha Milik Desa sebagai lembaga yang baru dilahirkan sangat rawan akan menarik perhatian dari segelintir elite di desa karena BUMDes berpeluang untuk menyedot anggaran desa dan menyuplai sumber daya di desa. *Elit Capture*¹⁷ dipahami sebagai suatu sikap atau tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan atau keputusan agar hasilnya memberikan keuntungan bagi mereka sendiri, baik yang berbentuk materi maupun non materi.¹⁸

Hal tersebut yang membuat ketiga aktor dalam perspektif *good corporate governance* yaitu Pemerintah Desa sebagai *state*, masyarakat desa sebagai *society* dan pihak dunia usaha tidak bekerjasama dengan baik dalam menentukan kebijakan. Padahal dalam mendirikan perusahaan agar terciptanya tatanan perusahaan yang baik, ketiga aktor tersebut harus saling berhubungan dengan baik. Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut menarik peneliti untuk menjadikan ini pembahasan ini sebagai kajian penelitian. Permasalahan di atas kemudian dirumuskan dalam pertanyaan penelitian, yaitu:

1. Apa peran aktor dalam pembentukan BUMDes Tirta Mandiri dalam perspektif *governance*?
2. Bagaimana sinergitas aktor-aktor dalam menjalankan BUMDes Tirta Mandiri ?

¹⁶Himawan S. Prambudi. 2001. *Politik Pemberdayaan: Jalan Mewujudkan Otonomi Desa*. Lapperapustala Utama. Yogyakarta.

¹⁷*Elit Capture* Merupakan Fenomena Biasa Dalam Berbagai Aspek Kehidupan. *Elite Capture* Dipahami Sebagai Suatu Sikap Atau Tindakan Yang Dilakukan Orang Atau Sekelompok Orang Untuk Mempengaruhi Pembuatan Kebijakan Atau Keputusan Agar Hasilnya Memberikan Keuntungan Bagi Mereka Sendiri, Baik Yang Berbentuk Materi Maupun Non Materi Dapat Dilihat Lebih Lanjut Di Setiadi, Sulistyono, Soyasuri Satiti Dna Agus Yuliono. 2016. Mengikis *Elite Capture* Dalam Artikel *Community Development*: Hal 1

¹⁸Mengikis *Elite Capture* Dalam Artikel *Community Development*: Hal 1

Tujuan Penelitian

Seperti telah dipaparkan di dalam latar belakang di atas, tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menjelaskan peran aktor dalam pembentukan BUMDes Tirta Mandiri.
2. Untuk menjelaskan sinergitas aktor-aktor tersebut dalam menjalankan BUMDes Tirta Mandiri.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat Penelitian adalah sebagai berikut :

1. Secara Akademis
 - a. Memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam peran negara, masyarakat dan swasta dalam kontestasi Badan Usaha Milik Desa.
 - b. Menjadi bahan lanjutan bagi peneliti berikutnya yang ingin mendalami peran negara, masyarakat dan swasta perumusan kebijakan baru.

2. Secara Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan baru yang baik bagi mahasiswa tentang peran aktor dalam governance terutama dalam konteks perumusan kebijakan baru.



